

Integrasi *Dzaka 'Aqli, Dzaka Dzihni, dan Dzaka Qalbi*; Analisis Filosofis Standar Nasional Pendidikan

Muhammad Amruddin Latif

STAINU Pacitan, Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Surel Korespondensi: latifmuhammad1001@gmail.com

Abstrak: Pendidikan saat ini lebih berorientasi pada aspek kognitif, dengan sedikit melupakan sisi afektif. Kita disuguhkan kenyataan dimana ilmu pengetahuan tidak mengimbas ke dalam hati, tidak mengendap menjadi pola kejiwaan, serta tidak merasuk dalam pembangunan mentalitas. Tujuan pendidikan Islam adalah mensinergikan dan mengembangkan dzaka 'aqli (IQ), dzaka dzihni (EQ), dan dzaka qalbi (SQ), agar menghasilkan daya guna yang maksimal, baik secara horizontal dalam muasyarah dengan manusia, maupun secara vertikal dalam hablum mina Allah. Kebijakan Standar Nasional Pendidikan masih perlu dikaji, terlebih pada cara penilaian dalam bentuk akreditasi yang lebih sering hanya perlu pembuktian berupa kertas yang rawan manipulasi. Administrasi yang bertele-tele perlu kiranya dikaji ulang, agar beban guru yang sudah berat tidak bertambah berat, agar guru fokus tetap dalam koridornya sebagai mananer of learning, director of learning, dan planner of the future society. Pendidikan juga harus berbenah dengan memberikan peluang peserta didik agar bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus diseragamkan.

Kata kunci: Filsafat pendidikan; standar nasional pendidikan

Abstract: Education is currently more oriented toward the cognitive aspect, with a little forgetting of the affective side. We are presented with a reality where science does not affect the heart, does not settle into psychological patterns, and does not penetrate the development of mentality. Islamic education aims to synergize and develop dzaka 'aqli (IQ), dzaka dzihni (EQ), and dzaka qalbi (SQ), to produce maximum efficiency, both horizontally in consultation with humans, and vertically in hablum mina Allah. The National Education Standards Policy still needs to be studied, especially on the method of assessment in the form of accreditation which more often only requires proof in the form of paper which is prone to manipulation. The long-winded administration needs to be reviewed, so that the burden on teachers who are already heavy does not get heavier, so that teachers stay focused in their corridors as managers of learning, directors of learning, and planners of the future society. Education must also improve by providing opportunities for students to be themselves without having to be uninformed.

Keywords: Educational philosophy; national education standards

PENDAHULUAN

Pendidikan sering diposisikan sebagai yang paling bertanggungjawab atas kompleksitas problem kehidupan. Seringkali persoalan baik buruk individu dan masyarakat dipulangkan pada kualitas pendidikannya. Salah satu tugas pendidikan -terlebih pendidikan Islam- selain mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sebagai *kawah candradimuka* bagi pembentukan etika dan moralitas, sebagaimana misi Rasulullah. Semua orang sepakat tentang pentingnya etika dan moralitas. Ia merupakan pranata fundamental dalam penataan masyarakat. Segudang masalah yang diderita negeri ini baik sosial, ekonomi, politik, budaya, radikalisme dan lain sebagainya, ternyata tidak cukup dipahami secara teknik mekanis, tidak bisa diselesaikan hanya dengan sains, serta tidak dapat diketengahi hanya dengan kecerdasan rasionalitas. Aspek etika dan moralitas ternyata perlu mendapat perhatian.

Dalam konteks moralitas, kehadiran Islam telah memberikan petunjuk praktis dalam kerangka penyempurnaan etika dan estetika manusia. Dalam diri manusia terkandung potensi kebaikan dan keburukan (*al-ba'its ad-dini wal ba'its asysyaithani*) (Siraj, 2012). Islam tidak mengingkari akal, namun agama memberi rambu-rambu bahwa kekuatan akal manusia tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat moralitas. Akal mudah diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Tidak ada kontradiksi antara pencernaan rasional dengan pewahyuan agama dalam persoalan moral. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi segenap bentuk perenungan rasional (*ta'aqul, tadabbur, wa i'tibar*).

Pendidikan saat ini lebih masih memberi porsi lebih pada aspek kognitif dengan sedikit melupakan sisi afektif. Kita disuguhkan kenyataan dimana ilmu pengetahuan tidak mengimbas ke dalam hati, tidak mengendap menjadi pola kejiwaan, serta tidak merasuk dalam pembangunan mentalitas. Fakta empiris akan hal tersebut bisa kita lihat dari kerusakan alam yang lebih sering disebabkan oleh mereka yang cerdas namun nihil moralitas. Pendidikan saat ini mereduksi intelegensia hanya sebatas akal dan panca indra, dan meninggalkan naluri, nurani, intuisi, dan imajinasi. Pendidikan saat ini mereduksi banyak khazanah dan mereduksi banyak hikmah, hanya memahami sains yang sifatnya empiris dan rasional. Sementara di lain pihak, ada juga institusi pendidikan yang hanya mencukupkan diri di ranah etika, sembari merendahkan kecerdasan logika.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah bukan tidak memperhatikan. Banyak langkah yang terus diupayakan, salah satunya masalah anggaran. Dalam APBN 2022, anggaran pendidikan sebesar Rp. 621,3 triliun, naik 78 triliun dari anggaran tahun 2021. Selain anggaran, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terbilang cukup serius. Hal ini bisa dilihat dari beberapa landasan-landasan hukum untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah juga melakukan standarisasi melalui BAN-S/M atau BAN-PT dalam bentuk akreditasi untuk menjaga kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), pemerintah memberikan 8 Standar Pendidikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang nantinya akan dinilai dalam bentuk akreditasi. 8 Standar Pendidikan tersebut adalah: Standar Isi (9 butir), Standar Proses (31 butir), Standar Kompetensi Lulusan (7 butir), Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (18 butir), Standar Pengelolaan (14 butir), Standar Pembiayaan (15 butir), dan Standar Penilaian (12 butir) (BAN-S/M, 2017).

Setelah melakukan kajian mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dan ironi pendidikan di Indonesia seperti tersebut di atas, maka dalam makalah ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia, dalam 8 Standar Nasional Pendidikan di Indonesia dengan pendekatan filosofis. Penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan dan Standar Kompetensi Lulusan pada lembaga pendidikan menengah SMP/MTs. Tulisan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana tinjauan filosofis tentang tujuan pendidikan? 2) bagaimana tinjauan filosofis tentang pendidik? 3) bagaimana tinjauan filosofis tentang peserta didik? 4) bagaimana analisis standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar kompetensi lulusan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan filosofis. Sumber primer dalam penelitian ini, diambil dari karya para filsuf guna menyelami tujuan pendidikan serta hakikat pendidik dan peserta didik. Adapun pada Standar Nasional Pendidikan, sumber diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan BAN-S/M, Perangkat Akreditasi SMP-MTs. Guna melengkapi data, peneliti juga mengambil sumber-sumber relevan dengan tema penelitian, seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pendidikan, Integrasi Jasmani dan Rohani

Untuk memahami tujuan pendidikan, yang paling utama adalah harus dimengerti hakikat manusia (Tafsir, 2017). Ini sangat urgen, sebab pendidikan adalah untuk manusia. Adalah sangat menggelikan apabila mendesain pendidikan, sementara tidak paham betul tentang siapa yang akan dididik dengan desain itu. Manusia dengan banyak bagiannya, hanya dipahami oleh kebanyakan orang pada beberapa bagiannya saja. Lantas dalam mendesain pendidikan, kesalahan yang paling sering muncul adalah mendesain pendidikan secara parsial, belum terintegrasi. Seringkali yang dididik adalah tangan manusia atau otak manusia. Manusianya sendiri tidak tersentuh. Karena itu para lulusannya memiliki kecerdasan kognitif dan keterampilan psikomotorik, tetapi ia belum tentu manusia (Tafsir, 2017). Padahal pendidikan itu adalah pendidikan untuk memanusiakan manusia. Kita perlu mengetahui hakikat dan kesejatan manusia (Siroj, 2012).

Menurut Socrates, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan kemajuan intelektual dan moralitas yang tinggi (Jalaluddin dan Idi, 1997). Nalar yang berpikir akan membebaskan manusia dari khayalan menuju kebenaran. Pendidikan mengemban amanah untuk memahami realitas

secara jelas dan rasional, serta tidak terjebak oleh narasi-narasi irasional mengenai realitas (Faiz, 2019). Toh begitu, Socrates tidak menafikan pentingnya moralitas, bahwa rasionalitas dan moralitas adalah sebuah keniscayaan. Disadari, pendidikan yang berlangsung hari ini masih terlalu dominan di ranah kognitif, kurang menyentuh ranah afektif. Dalam tasawuf, *dzaka 'aqli* (IQ), *dzaka dzihni* (EQ), dan *dzaka qalbi* (SQ) merupakan komponen-komponen potensi manusia yang perlu digali secara harmonis (Siroj, 2012). Ini agar menghasilkan daya guna yang maksimal, baik secara horizontal dalam *mu'asyarah* dengan manusia, maupun secara vertikal dalam *hablum mina Allah*. Tanpa itu, yang muncul adalah lahirnya krisis dan degradasi moral, kemerosotan sumber daya manusia, dan penyempitan cakrawala berpikir yang cenderung berkuat pada fanatisme sempit atau penolakan terhadap keberagaman.

Menurut Mahmud al-Sayyid Sultan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam harus memenuhi karakteristik, seperti: kejelasan, keumuman, universal, integral, rasional, aktual, ideal, dan mencakup jangkauan untuk masa depan. Dengan karakteristik ini, tujuan pendidikan harus mencakup aspek kognitif (*aqliyyah*), afektif (*khuluqiyyah*), psikomotorik (*jihadiyyah*), spiritual (*ruhiyyah*), dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) (Sulthan, 1981). Dari hal di atas kiranya dapat disimpulkan, bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada dunia dan melupakan akhirat, bukan pula sebaliknya. Pendidikan Islam tidak hanya membangun kecerdasan rasio, namun juga mentalitas. Pendidikan Islam tidak untuk mencetak para pemuja matrealisme, dimana memandang sesuatu hanya dari perspektif untung dan rugi. Bukan pula anti duniawi dan memilih untuk hidup di pojok-pojok sejarah. Pendidikan Islam bukan hanya untuk melahirkan manusia-manusia pintar, namun juga manusia yang penuh integritas, kejujuran, keadilan, prinsip kepercayaan, penguasaan diri, kemandirian, kedewasaan, dan sinergitas.

Pendidik; Hakikat, Kedudukan, dan Syarat

Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan. Di pundaknya digantungkan amanah besar dalam upaya menemani dan mengantarkan peserta didik untuk suatu tujuan mulia. Pendidik bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak didik, baik spiritual, intelektual, etika, estetika, maupun kebutuhan jasmani (Nizar, 2002). Ahmad Tafsir menjelaskan, pendidik dalam Islam adalah mereka yang mendayagunakan kemampuannya untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik, baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidik bertanggungjawab mengembangkan potensi-potensi peserta didik tersebut secara seimbang sampai mencapai tingkat yang optimal berlandaskan ajaran Islam (Tafsir, 2017). Sementara menurut Noeng Muhadjir, pendidik adalah seorang yang mempribadi (personifikasi pendidik), yakni *nyawijinya* keseluruhan yang diajarkan antara isi dan nilai (Muhadjir, 2002).

Kedudukan seorang pendidik dalam pendidikan Islam sangat penting dan terhormat. Dikutip oleh Suharto (Suharto, 2014), Imam Ghazali mengatakan:

Seorang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, dialah yang dinamakan orang besar di kolong langit ini. Dia ibarat matahari yang menyinari orang lain dan dirinya sendiri. Dia ibarat minyak kesturi yang wanginya dapat dinikmati orang lain, dan dia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka

sesungguhnya ia memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini.

Sementara, al-Abrasyi memandang pendidik sebagai bapak rohani (*spiritual father*) bagi anak didiknya. Pendidik adalah orang yang memberikan santapan jiwa dengan ilmunya. Pendidik merupakan manusia yang menjadi *wasilah* penentu hidup dan berkembangnya anak didik sesuai dengan bakatnya (Suharto, 2014). Dengan ini ia menetapkan standarisasi seorang pendidik profesional. Seorang pendidik tidak boleh menomorsatukan materi, menjauhi dari dosa-dosa besar dan kecil, ikhlas dalam bekerja, mencintai anak didik, pemaaf, mengetahui watak muridnya, menguasai materi (Suyudi, 2014). Benang merahnya, seorang pendidik dalam mendidik harus karena mencari ridha Allah (Athallah, tt).

Seorang pendidik dengan berbagai kompetensinya diharapkan dapat menjalankan profesinya dengan baik, ibarat rasul dengan sifat *tablighnya* menyampaikan risalah kepada umatnya. Abdurrahman al-Nahwali mensyaratkan 10 sifat yang harus dimiliki seorang pendidik. Kesepuluh sifat tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tujuan hidup, rasional, dan amal pendidik hendaknya bersifat *rabbani*, yakni bersandar kepada Allah, 2) menjalankan profesi guna mendapat ridha Allah, 3) menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh kesabaran, 3) menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran dan integritas, 4) senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi, 5) memiliki kemampuan penggunaan metode pembelajaran yang variatif, 6) memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, 7) memahami psikologi peserta didik, tanggap dan responsif terhadap perkembangan global, dan 8) adil dalam memperlakukan peserta didik (al-Nahwali, 1989).

Peserta Didik

Dilihat dari *maqamnya*, peserta didik adalah manusia yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing, mereka memerlukan bimbingan untuk menuju titik optimal daya guna fitrahnya. Potensi dasar yang dimiliki setiap manusia, kiranya tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa proses pendidikan (Suharto, 2014). Islam memandang “Setiap anak yang dilahirkan dengan dibekali fitrah, kedua orangtuanyalah yang menjadikan ia seorang Majusi, Nasrani, atau Yahudi”. Dari pandangan ini Islam berupaya menyinergikan pandangan nativisme yang menekankan pentingnya bakat bawaan manusia, dengan pandangan empirisme yang cenderung mementingkan peranan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang.

Melalui paradigma di atas, dapat dipahami bahwa Islam mengakui adanya fitrah pada peserta didik, namun fitrah ini tidak dapat dikembangkan secara maksimal apabila tidak didukung oleh lingkungan yang melingkupinya. Sinergi antara fitrah dan faktor lingkungan dalam konsepsi Islam merupakan proses dominan yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian peserta didik. Untuk itu, pemahaman hakikat peserta didik merupakan sesuatu yang urgen. Deskripsi mengenai hakikat peserta didik seperti yang ditulis

Samsul Nizar dalam bukunya *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis* (Nizar, 2002), adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik bukanlah orang dewasa yang bertubuh kecil, ia memiliki dunianya sendiri. Hal ini perlu dipahami, agar perlakuan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran tidak disamakan dengan orang dewasa.
2. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi dalam tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dalam menjalankan proses pendidikan harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
3. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik aspek jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Penyelenggara pendidikan yang memfokuskan diri hanya pada hal yang bersifat material dirasa kurang bijaksana, faktor kebutuhan yang bersifat immaterial seperti rasa aman, kasih sayang, harga diri, dll. juga harus dipenuhi .
4. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual (al-Mai'dah: 48), baik sebagai fitrahnya maupun lingkungan yang mempengaruhinya.
5. Peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yakni jasmaniah dan rohaniah. Unsur jasmani berkaitan dengan fisik yang dapat dikembangkan melalui proses latihan dan pembiasaan. Sedangkan unsur rohani berkaitan dengan daya akal dan rasa. Daya akal dapat ditajamkan melalui proses intelektualisme yang menekankan pada rasionalitas, sedang daya rasa dapat dikembangkan dengan ibadah, akhlak, dan *riyadhah an-nafs*. Islam memandang peserta didik secara utuh, semua daya yang ada dalam diri manusia harus didayagunakan secara integral dan harmonis.
6. Peserta didik adalah hamba Allah yang dibekali fitrah yang perlu dikembangkan secara maksimal dan sinergi. Fungsi pendidik dalam hal ini adalah menemani, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya tanpa menafikan sisi humanis.

Pemahaman hakikat peserta didik berfungsi sebagai landasan filosofis untuk mengimplementasikan proses pendidikan yang berorientasi pada peserta didik (*student oriented*), bukan lagi pada materi pelajaran (*subject matter oriented*). Pandangan modern memosisikan peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek. Peserta didik bukan untuk 'dieksploitasi', kedudukan pendidik dengan peserta didik bukanlah hubungan koersif dan feodalistis. Wawasan dasar pendidik dalam memandang peserta didik sebagai subjek pendidikan menumbuhkan *simbiosis mutualisme* demi proses perkembangan semua pihak. Memosisikan pendidik dan peserta didik sebagai subjek pendidikan mengindikasikan perlunya penerapan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Menurut filsafat ini, pengetahuan merupakan hasil konstruksi orang yang sedang belajar. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran merupakan hasil usahanya sendiri. Dalam konstruktivisme, pendidik dan peserta didik sama-sama mengalami proses belajar. Dalam paradigma pendidikan seperti, pendidik dan peserta didik ditempatkan sebagai subjek dan menolak paradigma lama yang memandang pendidikan sebagai proses indoktrinasi (Suparno, 2003).

Mendidik bukan semata mencerdaskan akal. Seorang pendidik tidak bisa hanya memperhatikan aspek rasio peserta didik saja. Definisi kecerdasan bukan pintar dalam arti yang selama ini dipahami banyak orang. Intelegensia mencakup hal-hal berikut: *Pertama*, Kecerdasan Intelektual (*Dzaka 'Aqli*), yakni kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara aktif masyarakat. *Kedua*, Kecerdasan Emosional (*Dzaka Dzihni*), kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi cobaan dan tantangan, mengendalikan dorongan hati, tidak larut dalam kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan rasionalitas, berempati, dan berdoa. *Ketiga*, Kecerdasan Spiritual (*Dzaka Qalbi*), pemahaman tentang kedirian manusia itu sendiri yang muaranya adalah menggapai *ma'rifatullah*, yakni Sang Khalik sebagai ujung terminal perjalanan hidup ini (Qasim, 1969).

Selanjutnya, dimensi-dimensi yang perlu dikembangkan kepada peserta didik menurut Zakiyah ada tujuh yang meliputi: dimensi fisik, dimensi akal, dimensi akhlak, dimensi pluralitas, dimensi kejiwaan, dimensi seni, dan dimensi sosial. Seyogyanya seluruh dimensi tersebut harus ditumbuhkembangkan kepada peserta didik melalui pendidikan. Pada hakikatnya, dimensi adalah salah satu media yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk membentuk diri, sikap, mental, sosial, budaya, dan kepribadian di masa yang akan datang. Serta mengilhami kedewasaan, baik kedewasaan berpikir, kedewasaan *bermuasyarah*, dan kedewasaan bersikap.

Standar Nasional Pendidikan; Ikhtiar Membangun Bangsa

Untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah menerbitkan PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Pasal 3 Bab II). Pasal 4 Bab II menjelaskan Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, Standar Kompetensi Lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Dalam melakukan penilaian di satuan pendidikan, 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut dituangkan dalam 124 instrumen yang harus tersedia di satuan pendidikan.

Selanjutnya untuk melakukan penilaian kelayakan pada satuan pendidikan menengah, diadakanlah akreditasi sekolah/madrasah dengan menunjuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang menetapkan kelayakan dan program dan /atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu SNP. BAN-S/M akan melakukan akreditasi pada setiap satuan pendidikan setiap lima tahun sekali, dengan menunjuk asesor untuk melakukan penilaian secara langsung di lapangan.

Peraturan pemerintah yang mengatur standar pendidikan tersebut tentunya dirumuskan oleh para ahli di bidangnya, dengan diskusi yang mendalam. Tujuan daripada kebijakan tersebut adalah juga untuk kepentingan nasional, agar bagaimana anak bangsa mampu bersaing di tengah kehidupan yang menuntut kreativitas untuk memenangkan persaingan di kancah dunia.

Namun tentunya, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada satupun karya manusia yang sempurna dan relevan di segala zaman. Banyak yang melakukan kajian dan memberi kritik terhadap kebijakan tersebut dengan perspektifnya masing-masing. Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menganalisis secara objektif Standar Nasional Pendidikan dengan kacamata filsafat. Beberapa kebijakan yang menggelitik dan absurd menurut penulis akan penulis kritisi berdasar teori-teori yang sudah disebutkan di atas. Namun dalam makalah ini, penulis tidak melakukan analisis pada keseluruhan lingkup Standar Nasional Pendidikan. Penulis akan memfokuskan analisis pada Standar Pendidik & Kependidikan dan Standar Kelulusan.

Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Di Indonesia ini ijazah masih dianggap 'dewa', ijazah dijadikan ukuran kecerdasan manusia. Salah satu syarat untuk diakuinya seorang pendidik di negeri ini adalah memiliki ijazah dari lembaga yang diakui oleh negara. Dalam pasal 29 Bab VI di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan kriteria atau kualifikasi pendidik yakni: memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajar, yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Dan dalam penilaiannya, ijazah dan sertifikat pendidik menempati poin khusus di instrumen akreditasi. Sejumlah 3 butir (nomor 39-41), mengatur mekanisme itu.

Kepercayaan terhadap kertas sakti yang bernama ijazah di satu sisi malah mengaburkan hakikat ilmu. Manusia saat ini telah 'dipaksa' untuk selalu tunduk pada diskriminasi yang didasarkan atas sertifikat atau ijazah mengenai keterampilan yang dimiliki seseorang. Para guru berijazah mendepak tiap individu tak berijazah. Seolah tak seorangpun diberi keleluasaan untuk mendidik diri sendiri atau diberi hak untuk mendidik orang lain tanpa ijazah. Di kehidupan dewasa ini, ijazah bukan lagi sebagai formalitas keilmuan, ia justru lebih dipentingkan daripada ilmu itu sendiri. Nilai-nilai dalam ijazah tak musti berbanding lurus dengan kualitas keilmuan si pemilik ijazah. Kebijakan tentang kualifikasi akademik yang dibebankan untuk pendidik tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap peredaran ijazah di negeri ini. Menjamurnya ijazah palsu seringkali digunakan oknum tertentu untuk memuluskan ambisinya, termasuk dalam di dunia pendidikan. Hal ini diperparah pada ketika dilakukannya visitasi akreditasi, pembuktian kualitas pendidik seringkali hanya dilihat secara seremonial dari tumpukan kertas yang disodorkan.

Kemuliaan seorang pendidik yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama dan filosof yang arif telah direduksi sedemikian rupa dengan hanya menilai mereka dari selebar kertas (ijazah). Orientasi yang menganggap ijazah dianggap sebagai faktor penting penentu legalitas seorang pendidik dirasa kurang bijaksana. Banyak

faktor kompetensi seperti: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang belum terjawab di ijazah. Selanjutnya dalam penilaian pedagogi seorang pendidik, BAN-S/M melalui asesor akan melakukan visitasi ke satuan pendidikan. Namun lagi-lagi masih berorientasi pada kertas. Asesor akan menilai kemampuan pedagogi seorang pendidik di satuan pendidikan yang meliputi penguasaan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dengan hanya melihat pada tumpukan RPP dalam dua tahun terakhir yang disusun secara mendadak. Mirisnya, setelah selesainya proses akreditasi, tumpukan-tumpukan kertas itu hanya akan menjadi menunggu setia gudang.

RPP memang penting dalam sebuah perencanaan, agar materi pembelajaran tersampaikan secara sistematis dan sesuai dengan kurikulum. Namun format RPP yang terlalu bertele-tele sangat menyusahakan pendidik, kebanyakan dari mereka habis waktunya untuk administrasi, padahal hal tersebut tidak esensial. Isi RPP dikatakan lengkap apabila meliputi: identitas sekolah/madrasah, tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ribet bukan? Tugas utama pendidik sebagai *spiritual father* tereduksi oleh simbol. Waktu bagi pendidik untuk *muthala'ah* meningkatkan kemampuan diri tersita untuk hal yang sifatnya seremonial belaka. Bagaimana pendidik bisa melakukan *transfers of knowledge* secara optimal kalo ia sendiri sudah sibuk merangkai kata demi sebuah laporan yang disodorkan untuk penguasa? Sebuah karya tak melulu soal kata-kata.

Sisi lain ketika selembarnya kertas diutamakan, hakikat pendidik semakin bias. Kedewasaan untuk menjadi sosok yang *digugu lan ditiru* seakan tak lagi menjadi falsafahnya. Hal yang terpenting adalah mengumpulkan berkas-berkas untuk kemudian ia mendapat kesejahteraan. Kehadiran pendidik di kelas tak dianggap lebih penting dari terisinya jurnal mengajar. Tak perlu terlalu memedulikan kompetensi personal-religius, jika ia sudah cukup tepat waktu dalam *finger print*. Tak usah bahas implementasi sosial-religius, karena itu sudah terwakili dalam RPP yang berpuluh-puluh lembar itu. Di pendidikan modern, pendidik yang profesional dan berprestasi adalah ia yang lihai dalam administrasi, serta selalu *update* dengan aturan-aturan baru dari pemerintah yang entah sudah berapa kali ganti. Bagi penulis, bukan kebijakan kalo hanya dilihat dari kotak-kotak prestasi yang tertuang dalam borang-borang kompetisi, tapi tak mengendap di hati.

Pendidik memiliki tugas yang berat di planet ini, masa depan anak bangsa seringkali dibebankan di pundak mereka. Tak akan ada profesi apapun tanpa campur tangan pendidik. Sialnya, kisah *Oemar Bakri* dalam lagu Iwan Fals masih sangat relevan di zaman ini. Belum meratanya kesejahteraan pendidik bisa jadi merupakan salah satu penyebab pendidikan di negeri ini *tuma'ninah* dalam keterpurukan. Untuk menuntut profesionalitas, harus diimbangi dengan kesejahteraan yang pas. Sekalipun jiwa guru tidak boleh *matrealis*, namun bukan berarti pemerintah boleh tidak memperhatikan kesejahteraan pendidik. Administrasi yang bertele-tele perlu kiranya dikaji ulang, agar beban guru yang sudah berat tidak bertambah

berat, agar guru fokus tetap dalam koridornya sebagai *manager of learning, director of learning, dan planner of the future society*.

Selain beban administrasi, beberapa guru diberi tugas tambahan di sekolah, seperti jabatan kurikulum, kesiswaan, dll. Hal tersebut menjadi masalah ketika masing-masing jabatan tersebut menuntut adanya administrasi yang tak kalah rumit. Sudah menjadi rahasia umum, ketika guru disibukkan pada hal-hal tersebut maka kelas akan terbengkalai. Dan lagi, banyaknya kegiatan-kegiatan ditingkat kabupaten yang melibatkan guru di satu sisi juga 'menggangu' Jangan heran kalo ternyata hasil pendidikan di sekolah kalah dengan lembaga-lembaga non formal. Memiliki akhlak mulia adalah suatu keniscayaan bagi seorang pendidik. Guru bukan hanya sebatas profesi, ia dan ilmu yang dimilikinya haruslah *nyawiji* dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidik harus menjadi *uswah hasanah* bukan hanya bagi para muridnya, melainkan juga bagi masyarakatnya. Pasal 19 Tahun 2015 menyebutkan kompetensi pendidik, diantaranya adalah kompetensi kepribadian. BNSP melalui BAN S/M memberi penjelasan terkait detail-detail yang dimaksud, diantaranya: berakhlak mulia, jujur, teladan, dewasa, arif, berwibawa dll. Namun lagi-lagi penilaiannya hanya dalam pembuktian selebar kertas, yakni berupa dokumen pernyataan kepala sekolah bahwa tidak ada satupun guru di sekolahnya tidak pernah tersangkut kriminal. Menurut penulis, ini sangat absurd! Bagaimana mungkin memberikan penilaian pada hal yang masuk di wilayah yang tidak cukup dilihat dengan panca indra dengan wawancara sekilas dan selebar kertas?¹

Salah satu upaya pengembangan kualitas pendidik adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tujuan adanya MGMP adalah sebagai ajang untuk diskusi, agar kualitas guru kian hari kian meningkat. Sayangnya, forum ini terlalu disibukkan pada pembahasan *wasilah* daripada *ghayah*. Seperti, bagaimana membuat RPP dan penilaian yang benar? Sosialisasi kebijakan inpassing, dll. Jarang sekali -atau malah tidak pernah- forum ini membahas perkembangan keilmuan di mata pelajaran tersebut.² Toh begitu, cukup banyak manfaat yang digali dari forum ini, mungkin fokusnya saja yang perlu dibenahi. Seorang pendidik adalah mereka yang dengan keikhlasannya mengajarkan humanisme di tengah kehidupan modern yang lebih sering merendahkan hakikat manusia. Pendidik adalah ia yang datang ke sekolah dengan tulus untuk mencetak generasi-generasi baru yang siap sedia meneruskan estafet kekhalfahan di muka bumi. Seorang pendidik harus memuat watak kegairahan dan keterbukaan terhadap ilmu, kemandirian, kemerdekaan dan sikap eksploratif, kasih dan santun memimpin proses sejarah yang menyangkut manusia dan alam, belum lagi

¹ Wawancara yang dimaksud adalah asesor melakukan wawancara kepada kepala sekolah, komite, dan beberapa siswa. Realita di lapangan, hal ini jarang dilakukan oleh asesor karena keterbatasan waktu, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kalo pun toh dilakukan, sangat mungkin sekali terjadi ketidakjujuran. Bisa saja yang diwawancara akan disetting untuk mengatakan hal yang baik-baik saja. Lagi pula parameter apa digunakan untuk menilai akhlak seseorang? Kepribadian sangat mungkin dimanipulasi demi sebuah pencitraan.

² Dari hasil pengamatan penulis, forum MGMP mapel PAI di suatu daerah malah dijadikan ajang untuk penyebaran ideologi tertentu, kampanye paslon presiden, dan ajang untuk menyalahkan kepercayaan lain. Tentu ini aneh, forum yang dimana 'ahli agama' berkumpul tapi jauh dari nilai-nilai agama. Irasionalitas tercermin dalam pencampuradukan kepentingan ego dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sering diterjemahkan secara langsung dalam ketelanjangan daya tangkap terbatas manusia.

substansi-substansi mendasar yang harus digenggam dengan sendirinya yakni: takwa, tawakal, ikhlas, tawadhu' *muthi'ilallah*, dan seterusnya.

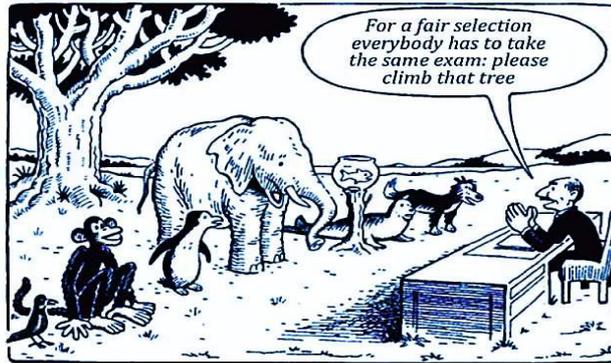
Seorang guru harus memiliki keikhlasan mendidik generasi bangsa untuk berendah hati; manusia sekadar bernilai 'tiada' di hadapan Dzat Yang Maha Ada. Mengajari berbudi luhur, yakni kemampuan untuk menaklukkan secara kesatria ego dan nafsu. Seorang pendidik hendaknya mengajari peserta didiknya berpengetahuan luas, dan itu artinya menjebol segala tembok penjara kebodohan. Pendidik harus siap dan bersedia mendidik berpikiran bebas, dan itu artinya kreativitas dan demokrasi. Seorang pendidik hendaknya punya kesanggupan dan kesungguhan untuk mengolah suatu generasi baru yang *muthahhar*, yang tercerahkan (*Islamic renaissance*) secara intelektual, mental, moral, dan spiritual, yakni suatu generasi yang dimungkinkan, diperkenankan dan diridhai oleh Allah untuk 'menyentuh' ilmu-Nya. Artinya, menjadi antena dengan sensitivitas dan kewaskitaan untuk memperoleh siaran ilmu, kesejahteraan, hikmah, kesembuhan, dan keselamatan dari samudra ilmu Tuhan.

Analisis Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 Bab V digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pasal 26 Bab V menjelaskan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Banyak para ahli yang memberikan kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Di negeri ini standar kompetensi peserta didik disusun dalam penyeragaman, padahal sebagaimana teori di atas, setiap insan lahir dengan fitrah dan bakatnya masing-masing. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa setiap orang itu jenius. Adalah kurang bijaksana menyeragamkan kemampuan peserta didik dalam bentuk soal-soal dimana hanya berpihak pada mereka yang kebetulan berbakat di bidangnya. Ibaratnya memaksa ikan memanjat, hanya akan membuatnya terlihat bodoh seumur hidup. Di pendidikan modern saat ini ada banyak anak yang senasib dengan ikan itu, berkulat di sekolah tanpa pernah menemukan bakatnya. Tugas pendidikan adalah menemani anak didik untuk menemukan dirinya sendiri, bukan menciptakan robot-robot hanya untuk kepentingan industri. Dunia berkembang, kita membutuhkan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan merdeka sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Siapun yang mengelola pendidikan sebaiknya disadari bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, kebutuhan berbeda, bakat berbeda, dan mimpi yang berbeda. Namun yang terjadi kita lebih sering mengajarkan hal sama dengan parameter penilaian yang sama pula. Kecerdasan seorang anak hanya diukur dari kemampuannya menjawab soal-soal ujian yang disusun oleh pemerintah atau MGMP. Seringkali mereka yang memang kurang pada kecerdasan kognitif akan merasa bodoh karenanya, apalagi adanya peringkat/ranking semakin membuatnya tidak berguna. Pendidikan yang ideal, seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme (mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau objek).



Gambar 1. Ilustrasi penyeragaman kemampuan

Pendidikan seperti itu membuat peserta didik menjadi tidak mampu membedakan proses dari substansi, karena sekolah telah mencampur-adukkannya. Peserta didik sebagai konsumen diajar untuk menyesuaikan keinginan mereka dengan nilai yang dapat dipasarkan. Maka mereka dikondisikan untuk merasa bersalah jika mereka tidak berperilaku sebagaimana diprediksi oleh penelitian konsumen dengan angka rapor, sertifikat, atau ijazah yang akan menempatkan mereka pada pekerjaan yang telah diramalkan untuk mereka. Pada akhirnya peserta didik menyamakan begitu saja pengajaran dengan belajar, naik kelas dengan pendidikan, ijazah dengan kemampuan, dan kefasihan menceritakan kembali dengan kemampuan mengungkapkan sesuatu yang baru dan anak dibiasakan menerima pelayanan bukan nilai. Ketergantungan pada pelayanan lembaga ini membuat mereka menjadi sangsi akan kemampuan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Keterfokusan pada ijazah mungkin saja menjadi masalah kita selama ini, yang berakibat pada skala yang lebih luas. Ketidakmurnian ini mengaburkan kemuliaan ilmu, bahwa sehebat apapun seseorang tak akan dianggap kredibilitasnya bila tidak memiliki ijazah. Orang lebih rela kehilangan ilmu daripada kehilangan ijazah. Akibatnya, tujuan pendidikan di sekolah hanya sebatas kemampuan menjawab soal-soal ujian, bukan soal-soal ujian sebagai *wasilah* untuk mematangkan ilmu. Titik puncaknya adalah sekolah berpikir keras agar bagaimana anak didiknya memiliki nilai bagus dalam ujian, entah bagaimana caranya. Tujuannya, agar nama sekolah memiliki wibawa di depan para penguasa dan masyarakat. Bagi sekolah, peringkat sekolah lebih membanggakan daripada kesuksesan menghantarkan anak dalam kesejatan hidup.

Sialnya, *mindset* seperti di atas diamini pula oleh anak didik dan orang tua. Tujuan mereka sekolah untuk mendapatkan ijazah, yang dengannya diharapkan memperoleh kemapanan hidup, kemapanan dalam bentuk kekayaan materialisme. Mereka belajar hanya untuk mendapat nilai bagus, bahkan jika perlu lupakan kejujuran demi sebuah nilai yang bisa dipamerkan. Adanya sistem pola pikir yang demikian menyebabkan bidang-bidang eksakta dan teknis menjadi perhatian utama sementara wilayah yang mencakup kemanusiaan (ilmu sastra, seni, ilmu sosial, etika dan sebagainya) cenderung termarginalkan. Akibatnya, munculnya berbagai krisis manusia modern yang bersumber pada masalah makna. Modernisme dengan kemajuan teknologi dan pesatnya industrialisasi dapat menciptakan manusia meraih kehidupan yang luar biasa. Namun seiring dengan logika dan orientasi modern, kerja dan materi lantas menjadi aktualisasi kehidupan masyarakat dan gagasan

tentang makna hidup terhancurkan. Implikasinya, manusia kemudian menjadi bagian mesin yang mati. Masyarakat lantas tergiring pada proses penyamaan diri dengan segala materi serta pendalaman keterbelakangan mentalitas. Manusia semakin terbawa arus deras desakralisasi, dehumanisasi, karena ia selalu disibukkan oleh pergulatan tentang subyek positif dari hal yang empiris.

Untuk mengukur kemampuan peserta didik, sekolah akan mengadakan serangkaian ujian, baik tulis, praktik, portofolio, dll. Setiap tiga bulan sekali diadakan PTS dan PAS pada setiap akhir semester. Dalam rapor yang terbaru (K-13) sebenarnya sudah mengintegrasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif bukan lagi satu-satunya penentu dalam penilaian. Setiap anak berkesempatan untuk menjadi yang terbaik. Hanya saja banyak sekolah masih menerapkan gaya lama, dimana kemampuan menjawab soal dan daya hafal masih menjadi parameter utama penilaian. Banyak dari pendidik masih menerapkan pola lama dengan hanya memberikan tugas berupa soal-soal untuk kemudian dinilainya. Jarang yang memberi tugas berupa praktik atau karya. Akibatnya, dalam penulisan rapor pada akhirnya disesuaikan dengan hasil ujian tulis tadi. Praktik tersebut biasanya dikenal dengan istilah '*ngaji*' (*ngarang biji*). Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan tiga aspek tersebut belum sepenuhnya diamalkan banyak sekolah. Akibatnya pendidikan masih menggunakan *madzab* lama, yakni gaya kolonial.

Selanjutnya dalam visitasi akreditasi, untuk membuktikan kualitas peserta didik dalam ranah spiritual, asesor akan minta bukti fisik berupa foto-foto kegiatan siswa, dan observasi lingkungan tentang aktivitas yang dilakukan siswa. Menurut penulis ini absurd, bagaimana mungkin ranah esoteris dinilai hanya dengan sebuah gambar yang rawan manipulasi? Untuk sebuah hasil yang mendekati objektif, setidaknya benar-benar dilakukan observasi mendalam, bukan sebatas gambar dan pengamatan dua jam. Senyampang dengan itu, dalam ranah kognitif dan psikomotorik, penilaian kualitas pendidik lagi-lagi hanya dinilai dari data-data yang seringkali diada-adakan.

Pendidikan yang demikian, menurut penulis mulai kehilangan tujuan inti pendidikan. Pemegang kebijakan membuat standarisasi yang termaktub dalam 124 poin instrumen akreditasi, yang sifatnya hanya sebatas 'bungkus', bukan substansi. Sekolah berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai akreditasi A melalui kelengkapan administrasi dan fasilitas. Berjuang sekuat tenaga agar para siswanya mendapat nilai tinggi dalam ujian, bertepuk riang saat mendapat piala dan sertifikat. Para peserta didik mendatangi sekolah bukan untuk mencari ilmu atau melatih kepekaan sosial, namun sekedar duduk manis dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah konon 'demi masa depan'. Pada budaya dan perilaku manusia beserta sistem nilai yang disusun pada kolektivitas, mayoritas 'korban pendidikan', yakni memandang dunia sebagai tujuan. Seluruh aktivitas pribadi, sosial, pengorganisasian kekuasaan dan kesejahteraan bahkan pendidikan diantara mereka dilaksanakan dengan mengandaikan bahwa dunia ini adalah wadah satu-satunya dari segala awal dan segala akhir.

Perlu adanya pembaharuan dalam pendidikan, pendidikan yang benar-benar mendidik, yang memanusiaikan manusia. Pendidikan yang bukan hanya terpaku pada rutinitas dan formalitas, namun mementingkan inovasi dan substansi. Pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi masa depan yang tidak atau belum mereka perhitungkan, serta menumbuhkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan mereka temui dimasa mendatang. Pendidikan harus melahirkan generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan era modern: demokratisasi kehidupan, redistribusi *rizqullah*, defeodalisasi kebudayaan, pemerdekaan (Islamisasi) segala bidang dalam pagar *iradatullah*, bahkan jawaban-jawaban empiris terhadap teknologisasi dan industrilialisasi peradaban.

Dalam pendidikan Islam, kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan emosi dan ketajaman spiritual. *Dzaka 'aqli* (IQ), *dzaka dzihni* (EQ), dan *dzaka qalbi* (SQ) merupakan komponen-komponen manusia yang harus dikembangkan dan disergikan, sehingga menghasilkan daya guna yang luar biasa, baik secara vertikal maupun horizontal.

SIMPULAN

Tujuan pendidikan Islam adalah mensinergikan dan mengembangkan *dzaka 'aqli* (IQ), *dzaka dzihni* (EQ), dan *dzaka qalbi* (SQ), agar menghasilkan daya guna yang maksimal, baik secara horizontal dalam *muasyarah* dengan manusia, maupun secara vertikal dalam *hablum mina Allah*. Tanpa itu yang muncul adalah tumbuhnya krisis dan degradasi moralitas, kemerosotan sumber daya manusia, dan penyempitan cakrawala berpikir yang cenderung berkuat pada militansi sempit atau penolakan terhadap keberagaman.

Pendidik dalam Islam adalah mereka yang mendayagunakan kemampuannya untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik, baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidik bertanggungjawab mengembangkan potensi-potensi peserta didik tersebut secara seimbang sampai mencapai tingkat yang optimal berlandaskan ajaran Islam. Islam mengakui adanya fitrah pada peserta didik, namun fitrah ini tidak dapat dikembangkan secara maksimal apabila tidak didukung oleh lingkungan yang melingkupinya. Keterpaduan antara fitrah dan faktor lingkungan dalam konsepsi Islam merupakan proses dominan yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian peserta didik.

Pendidikan saat ini terpaku pada administrasi dan simbol. Kebijakan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan yang harus dibuktikan dalam akreditasi lebih terfokus pada tumpukan kertas. Administrasi yang bertele-tele perlu kiranya dikaji ulang, agar beban guru yang sudah berat tidak bertambah berat, agar guru fokus tetap dalam koridornya sebagai *mananer of learning*, *director of learning*, dan *planner of the future society*. Pendidikan juga harus berbenah dengan memberikan peluang peserta didik agar bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus diseragamkan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Nahlawi, Abdurrahman. 1989. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah, dan di Masyarakat*. Bandung: Diponegoro.

Athailah, Ibnu. tt. *al-Hikam*. Kediri: Koperasi ats-Tsuraya.

BAN-S/M, *Perangkat Akreditasi SMP-MTs Tahun 2017*

- Faiz, Fahrudin. 2019. *Sebelum Filsafat*. Yogyakarta: MJS Press.
- Jalalain, Imam. tt. *Tafsir Jalalain*. Jakarta: al-Haramain.
- Jalaluddin & Idi A. 1997. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhadjir, Noeng,. 2003. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Qasim, Mahmud. 1969. *al-Khayal fi Madzhab Muhyiddin Ibn 'Arabi*. Cairo: Ma'had al-Buhuts wa ad-Dirasah al-Arabiyah.
- Rajab, Ibnu. tt. *Lathaifu al-Ma'arif*. Cairo: ttp.
- Siroj, Said Aqil. 2012. *Tawasuf Sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Jakarta: SAS Foundation.
- Suharto, Toto. 2014. *Filsafat Pendidikan Islam; Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sulthan, Mahmud al-Sayyid. 1981. *Mafahim Tarbawiyah fi al-Islam*. Cairo, Dar A-Ma'arif.
- Suparno, Paul, dkk. 2003. *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyudi, M. 2014. *Filsafat Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Belukar.
- Tafsir, Ahmad. 2017. *Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.